

**PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH
TABANAN, BALI**

Made Heny Urmila Dewi

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana-Bali

Email: heny.urmila@yahoo.co.id

Chafid Fandeli

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

M. Baiquni

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The development of rural tourism requires the participation of local communities in the entire development phases starting from the planning, implementation, and supervision. However, in reality, public participation is often completely overlooked. This study aims to examine the involvement of local communities in the development of rural tourism and formulate the model of tourism development which upholds the participation of local community. The study is conducted in rural tourism Jatiluwih, Tabanan Regency, Bali. The process of collecting data through the studi literature, in-depth interviews and non-participant observation. The analytical method used is descriptive analysis. The result of the research indicates that the development of rural tourism in Jatiluwih still does not yet involve the local community. The role of government seems dominant, but when referring to the clean and sustainable governance approach, the role of the government is expected to become a facilitator by providing bigger opportunity to take part as well as the benefits from the development to the local community. It is required the political will of the government to reduce the dominant role in developing rural tourism, through opening wider space for the community to participate.

Keywords: Development, Rural Tourism, Participation, Local Community.

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Akan tetapi, dalam realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian dalam tulisan ini dilakukan di desa wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat

lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan, padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: Pengembangan, Desa Wisata, Partisipasi, Masyarakat Lokal.

PENGANTAR

Desa Jatiluwih terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Berjarak 26 km dari ibukota Kabupaten Tabanan, dan sekitar 47 km dari ibukota Provinsi Bali. Desa Jatiluwih adalah sebuah desa dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Batukaru. Desa ini berada di ketinggian 500-1500 meter dari permukaan laut dan memiliki curah hujan rata-rata 2500 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 26^o-29^oC sehingga udara di sini tergolong sejuk. Topografi desa ini berbukit-bukit dengan kemiringan mencapai 60^o sehingga persawahan sebagai lahan utama penghidupan penduduk harus dibuat bertingkat-tingkat (berteras).

Terasering sawah dibuat selain untuk memenuhi fungsi utamanya sebagai pengatur irigasi persawahan, juga merupakan cermin dari bertahannya kebudayaan lokal, khususnya bertahannya sistem mata pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, juga sebagai pemahaman petani terhadap *tri hita karana*, yaitu menjaga hubungan yang serasi dan selaras antara manusia dengan lingkungannya. Petani dalam membuat terasering sawah akan tunduk kepada *landscape* alam dan tidak bisa memaksakan bentuk terasering sesuai keinginan mereka. Kondisi alam Desa Jatiluwih yang masih asri, persawahan berteras yang tertata rapi menjadi daya tarik utama desa ini. Selain keindahan terasering sawah, sumber daya alam dan budaya yang berpotensi untuk dijadikan atraksi wisata, misalnya, bentuk pemukiman penduduk dengan *jineng*-nya,

air terjun, kesenian khas Jatiluwih bernama *rindik*, dan wisata kuliner khas Jatiluwih dengan beras merah yang berkualitas baik, menambah pesona Desa Jatiluwih sebagai daerah wisata.

Keindahan alam Desa Jatiluwih dengan terasering sawah telah diakui sebagai salah satu kekuatan utama kepariwisataan di Bali dalam peta kepariwisataan dunia. Keunikan terasering sawah telah memosisikan Jatiluwih sebagai salah satu objek yang termasuk dalam situs warisan budaya dunia sehingga berkemampuan untuk menggerakkan minat wisatawan untuk melakukan kunjungan ke Jatiluwih. Penetapan Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dinilai strategis terutama sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya yang berbasis kekuatan nilai-nilai budaya yang ada, mendorong pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata belum berpihak kepada masyarakat Jatiluwih. Contohnya, sawah dan petani merupakan aset pariwisata yang dijual untuk kepuasan wisatawan. Namun, pengembangan desa wisata tidak berpihak kepada kehidupan petani. Petani tetap miskin sementara investor meraup keuntungan besar dari aktivitas pariwisata ini. Padahal, jika tidak ada sawah dan petani pariwisata di Jatiluwih tidak akan berkembang.

Kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kaum kapitalis (investor). Investor dibiarkan membangun fasilitas wisata berupa vila di tengah hutan berdekatan dengan Pura Luhur Petali. Pembangunan vila tersebut telah melanggar radius kesucian pura (kurang dari dua kilometer dari Pura Luhur Petali) dan melanggar Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 tahun 2005 khususnya pasal 14 ayat (5). Lokasi dan desain vila nampak arogan dan kontras dengan lingkungan sekitar. Masyarakat Jatiluwih menentang keras keberadaan vila tersebut karena ancaman terhadap kesucian pura.

Pembangunan vila Petali bermakna bahwa kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada kepentingan kelestarian alam dan budaya. Kondisi ini terjadi karena pembiaran yang dilakukan pengambil kebijakan walaupun alam dan budaya dikorbankan demi kepentingan bisnis. Kerusakan pura ibarat neraka bagi generasi mendatang. Hal ini berarti bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak terwujud di wilayah Jatiluwih.

Masuknya kaum kapitalis dalam pengembangan desa wisata membangun area kompetisi ekonomi. Kompetisi tidak saja dalam perebutan lapangan pekerjaan juga dalam hal modal. Kelompok kapitalis lokal bersaing dengan pemodal kuat dari luar desa bahkan berasal dari luar Bali. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang. Ketidakadilan berpotensi terjadinya konflik. Oleh karena itu, memberi ruang gerak bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan sangat diperlukan. Jika tidak, kenyamanan desa wisata Jatiluwih akan dipertaruhkan. Pariwisata dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan mengkaji model pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pengembangan desa wisata yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam pengembangan desa wisata. Pihak terkait dapat berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi masyarakat lokal untuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Pembangunan berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh

masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata.

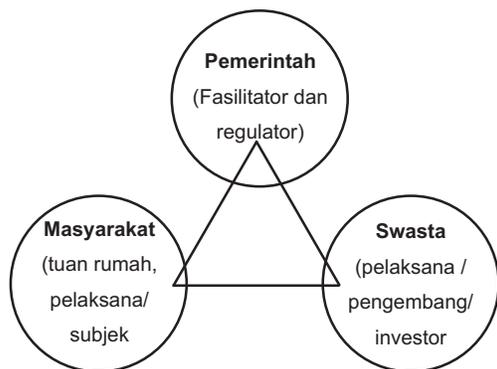
Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik .

Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha

untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.



Gambar 1
Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan
Pariwisata

Sumber: diadaptasi dari Wearing (2001)

Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi

awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata (Nasikun, 1997).

Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, Timothy memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan.

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan.

Pandangan ini serupa dengan Abe (2002) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Abe ini diperkuat oleh Sanof (2000), Randolph (2004), Adiyoso (2009).

Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya.

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, aspek partisipasi merupakan isu mendasar. Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi pencapaian desa wisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi desa wisata yang berkualitas.

Kajian pengembangan desa wisata yang berbasis partisipasi masyarakat ini

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan fenomena secara mendalam yang digali melalui pandangan dan pengalaman masyarakat. Kelebihan pendekatan ini bisa mendapatkan perspektif yang lebih alami dari suatu kehidupan masyarakat dan membuka peluang untuk pendalaman yang lebih rinci dari pandangan-pandangan individu dalam masyarakat (Lewis, 2003).

Data yang digunakan di dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menghasilkan data primer digunakan wawancara individu untuk memperoleh pandangan-pandangan dan informasi mengenai pengalaman-pengalaman keikutsertaan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata. Teknik ini sangat bermanfaat dalam penelitian sosial karena wawancara mendalam dapat menggali keterangan dan pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalaman masyarakat lebih mendalam. Panduan wawancara digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan data dari orang-orang yang menjadi informan.

Wawancara dan pengamatan lapangan dilakukan dengan informan terpilih seperti, *pemangku* (pemimpin upacara keagamaan) di Pura Luhur Petali, bendesa adat (tokoh adat), pemilik rumah makan dan penginapan, para petani, sesepuh desa, dan pemilik tanah dekat pura yang telah dijual kepada investor. Keseluruhan jumlah informan dalam studi ini sebanyak 22 orang. Pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling*, dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada (1) mereka yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan desa wisata, (2) mereka yang memiliki pengetahuan dan bersikap kritis terhadap berbagai kasus yang muncul akibat pengembangan desa wisata, dan (3) mereka yang berpengetahuan terkait prinsip-prinsip pengembangan desa wisata.

Selain data primer dari wawancara, pengamatan langsung juga digunakan. Kombinasi hasil wawancara mendalam dan

pengamatan langsung dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan data komprehensif dan bermakna. Selain data primer, digunakan juga data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, laporan terbitan pemerintah, jurnal-jurnal, Koran, *website*, dan sumber-sumber lain. Ketersediaan data di desa Jatiluwih cukup lengkap dan sangat membantu studi ini. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Data diinterpretasikan dan dianalisis melalui evaluasi, justifikasi, dan dibahas sesuai dengan tinjauan pustaka dan dibandingkan dengan data yang ada.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan. Berikut ini akan dijelaskan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahap pengembangan sebagai berikut.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Parameter yang digunakan untuk menentukan derajat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Tulisan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jatiluwih mengaku tidak dilibatkan dalam identifikasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Mereka tidak pernah diajak berdialog dalam mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat lokal. Hal ini terjadi, karena (1) gagasan pengembangan desa wisata dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya, sehingga masyarakat Jatiluwih kurang memahami latar belakang pengembangan desa wisata; (2) masyarakat lokal hanya menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, misalnya, kesediaan menerima kedatangan wisatawan dan menyerahkan lahan untuk dibangun fasilitas wisata; dan (3) masyarakat lokal tidak berkekuatan untuk berpartisipasi aktif dalam arti ikut memberi warna terhadap keputusan yang akan diambil oleh penguasa.

Pada tahap ini, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tergolong semu. Benefit yang diperoleh dari bentuk partisipasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat lokal atas keputusan yang diambil oleh penguasa sering diabaikan. Padahal substansi dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Jatiluwih seharusnya bersifat aktif dan langsung. Namun, selalu dihadang oleh keputusan penguasa yang bersifat *top-down*. Mekanisme seperti ini menjadikan masyarakat Jatiluwih tidak terbiasa berpartisipasi. Ketergantungan terhadap pemerintah dan investor tinggi. Kondisi ini berakibat pada kurangnya respons, antusiasme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan asset-aset di wilayah mereka.

Dalam hal keaktifan masyarakat Desa Jatiluwih, hasil penelitian menemukan bahwa kehadiran warga dalam pertemuan desa cukup antusias. Walaupun warga masyarakat banyak yang hadir dalam setiap pertemuan, pada umumnya mereka mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perihal pengembangan desa wisata. Dalam hal keterwakilan masyarakat pada rapat-rapat, biasanya perangkat desa hanya mengundang beberapa warga yang merupakan perwakilan tiap-tiap banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40

persen warga mengaku jarang diundang dalam pertemuan di desa. Sebanyak 25 persen bahkan menyatakan tidak pernah diundang dalam pertemuan yang membahas pengembangan desa wisata.

Isu menarik lainnya adalah keterwakilan masyarakat. Meskipun peserta yang hadir dalam perencanaan pengembangan desa wisata berasal dari berbagai latar belakang, hal ini belum mencerminkan keterwakilan. Pertemuan-pertemuan itu biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat di banjar adat dan dinas, *sekaa* (kelompok) teruna-teruni, warga masyarakat yang berpendidikan, misalnya guru, pegawai negeri sipil, dan rohaniawan, yang secara resmi diundang oleh kepala desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat karena dominasinya adalah golongan menengah ke atas, termasuk para pelajar, orang berpendidikan, dan para pemimpin informal.

Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Implementasi

Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata, misalnya, sebagai pengelola penginapan, pengelola rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel, karyawan hotel, dan pengelola atraksi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implentasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha-usaha berskala kecil. Hal ini terlihat kontras dengan partisipasi masyarakat luar yang memonopoli usaha berskala besar. Misalnya, dari tujuh fasilitas wisata berupa 4 buah sarana akomodasi dan 3 buah restoran, lima di antaranya dikelola oleh orang asing, dan hanya dua buah yang dikelola oleh masyarakat lokal. Penyebabnya adalah karena peluang usaha tersebut memerlukan modal besar, risiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Masyarakat Jatiluwih dengan

kompetensi bisnis yang rendah dan keterbatasan modal menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar desa. Ironisnya, para pemilik modal besar tidak hanya menekuni usaha berskala besar, juga mengambil alih usaha berskala kecil yang pada mulanya dikelola masyarakat lokal. Akibatnya, sebagian besar hasil usaha-usaha tersebut tidak terdistribusi di tingkat lokal melainkan mengalir keluar desa.

Intervensi modal asing yang merambah sampai wilayah pedesaan, menyebabkan terjadinya proses marginalisasi posisi sosial ekonomi masyarakat Jatiluwih. Pengembangan desa wisata dipandang sebagai neokapitalis yang hanya mengeksploitasi masyarakat lokal, sementara keuntungan dan manfaat pengembangan desa wisata sebagian besar dinikmati kaum kapitalis. Kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar lapisan masyarakat semakin besar, pada akhirnya, masyarakat lokal tetap berada di posisi marginal dalam usaha yang justru terjadi di wilayahnya sendiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata belum bermanfaat ekonomis bagi masyarakat Jatiluwih.

Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Pengawasan

Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap

pengembangan desa wisata terlihat minim. Alasannya, karena perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemerintah secara *top-down*, sehingga masyarakat tidak berkompetensi untuk melakukan pengawasan, di samping itu pengawasan oleh masyarakat dimaknai oleh pemerintah sebagai tindakan memata-matai program yang dilakukan pemerintah sehingga berujung terjadinya konflik.

Pada akhirnya, masyarakat memilih berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif untuk mencegah tindakan-tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan desa, misalnya, mengawasi kehidupan anak muda yang mabuk-mabukan di sekitar are kafe Jatiluwih di malam hari, pengawasan terhadap pedagang acung yang berjualan di sekitar terasering sawah, dan pengawasan parkir kendaraan yang tidak teratur dan sering menimbulkan kemacetan. Sedangkan pengawasan yang bersifat lebih kompleks seperti pelanggaran tata ruang, pelanggaran kawasan suci, sebagian besar warga bersikap tidak peduli, padahal secara substansi seharusnya masyarakat lokal ikut mengawasi. Selama ini pengawasan yang bersifat kompleks hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat yang kritis termasuk elite masyarakat lokal.

Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan model yang relevan dalam pelaksanaan program tersebut. Model dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya.

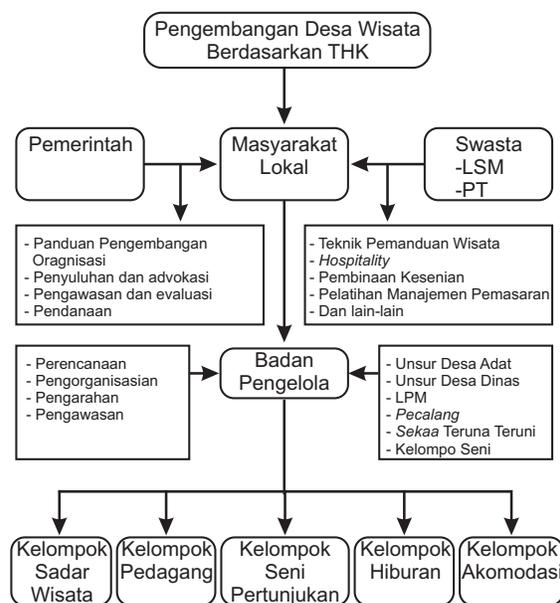
Harapan masyarakat Jatiluwih dalam pengembangan desa wisata kedepan adalah (1) pengembangan desa wisata harus berpedoman pada filosofi *tri hita karana*. *Tri*

hita karana adalah falsafah hidup berdasarkan agama Hindu yang mengajarkan perlunya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), dengan sesamanya (*pawongan*), dan dengan alam lingkungannya (*palemahan*) guna mencapai kesejahteraan lahir batin; (2) masyarakat harus terlibat penuh dalam pengembangan desa wisata; (3) menghargai hak-hak masyarakat lokal; (4) memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesucian pura-pura yang ada di sekitar Desa Jatiluwih; (5) pemanfaatan rumah penduduk untuk akomodasi wisatawan; dan (6) ada kelembagaan otonom dan mandiri yang dibentuk oleh masyarakat lokal dibawah tanggung jawab desa adat.

Ada jaminan bahwa masyarakat harus terlibat di dalamnya agar program pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin hal itu dirumuskan hal-hal sebagai berikut. (1) pengembangan desa wisata harus berpedoman pada filosofi *tri hita karana*; (2) masyarakat lokal menjadi sentral dan menjadikan subjek dari semua proses pengembangan desa wisata. Dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral diharapkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik sumber daya pariwisata akan terdorong dan mampu menyejahterakan masyarakat lokal; (3) pengembangan desa wisata membutuhkan adanya kemitraan yang solid antara tiga unsur utama, yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, yang masyarakat lokal menjadi pemangku kepentingan dari kerja sama tersebut. *The golden triangle* hanya dapat berhasil diterapkan apabila pemrakarsa kemitraan mengerti hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kerja sama; (4) ketiga pemangku kepentingan tersebut berada pada posisi yang sejajar dalam melakukan kerja sama serta saling menghormati; (5) perlu dibentuk badan pengelola yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi, memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi; (6) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dibuat ditingkat lokal oleh

warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan; dan (7) fokus utama pengembangan desa wisata adalah memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada pada masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada model tersebut terdapat kaitan antara faktor internal dan eksternal sebagai pendamping dan motivator seperti institusi pemerintah, NGO, akademisi, asosiasi, dan investor. Selanjutnya, pelaksanaannya memperhatikan fungsi manajemen dan sumber daya yang dimiliki (SDM, peralatan, modal, material, dan informasi). Model pengembangan berbasis partisipasi seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2

Model Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Oleh: Made Heny Urmila Dewi, 2013)

Pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan tersebut terarah, peran dan tanggung jawab masing-masing harus jelas. Peran dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut. Peran dan Kewenangan Pemerintah, yaitu (1) melakukan pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas desa

sebagai unsur kenangan wisata; (2) melakukan penataan dan konservasi lingkungan fisik kawasan yang menjadi ciri khas desa wisata; (3) melakukan perbaikan/pengadaan infrastruktur persampahan dan sanitasi; (4) melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona; (5) melakukan pembuatan informasi dan fasilitas kepariwisataan; (6) melakukan perbaikan/peningkatan kualitas ruang publik, pedestrian dan *landscape* desa/lingkungan untuk mendukung sapta pesona; dan (7) dukungan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pelestarian lingkungan pariwisata (kawasan Hutan, dan sawah).

Peran dan Kewenangan Swasta (Investor, Perguruan Tinggi, LSM, pelaku pariwisata lainnya), yaitu (1) melakukan promosi terintegrasi antar pengelola objek wisata untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata; (2) pembuatan dan pemasaran paket-paket wisata yang kompetitif yang terjangkau masyarakat; (3) pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan individual terkait usaha di bidang pariwisata (pelatihan bahasa Inggris, pelatihan *hospitality*, pelatihan mengenal budaya, dan karakteristik wisatawan dalam dan luar negeri); (4) pengembangan kelompok usaha bersama masyarakat; dan (5) menjalankan bisnis perhotelan, restoran, souvenir, dan lain-lain.

Peran masyarakat Lokal, yaitu (1) menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional, upacara adat, kerajinan tangan dan kebersihan merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik bagi pariwisata; (2) pelaku budaya, misalnya, kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata; dan (3) penyedia akomodasi dan jasa pemandu wisata, penyediaan tenaga kerja, produk makanan khas, kerajinan lokal, kesenian lokal, dan sebagainya.

Peran dan Kewenangan Badan Pengelola, yaitu (1) badan pengelola sebagai pengelola utama dan pengarah dalam perlindungan, perawatan, pelestarian guna

mempertahankan fungsinya sebagai desa wisata (*cultural and natural heritage*); (2) melakukan pengaturan yang diperlukan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Jatiluwih; (3) menyediakan dan mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha; (4) memberikan dan mecabut izin penempatan, menetapkan persyaratan-persyaratan, dan menetapkan serta melakukan pungutan segala usaha komersial di Desa Wisata Jatiluwih; (5) menetapkan dan memungut biaya/retribusi dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia dan hasil seluruhnya merupakan pendapatan badan pengelola; (6) melakukan perencanaan dalam bidang pengembangan atraksi/produk wisata, pengembangan fasilitas wisata; (8) melakukan pengorganisasian dalam bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan; (9) melakukan pengarahan untuk peningkatan kompetensi pengelola Objek wisata agar sesuai dengan tujuan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan; dan (10) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas kepariwisataan agar tercapainya tujuan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, tetapi masih menjadi objek pembangunan.

Masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Jatiluwih perlu diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Selama ini pariwisata yang dikembangkan di desa wisata tersebut tidak pernah di desain oleh mereka. Pariwisata

yang dikembangkan didesain oleh orang luar desa. Masyarakat lokal terpinggirkan. Pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Untuk menjamin hal itu diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi peranannya dalam pengembangan desa wisata dan memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selama ini masyarakat terbiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan tidak di biasakan berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Adiyoso, W. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: ITS Press.
- Arnstein, S.R. 1969. *A Ladder Of Citizen Participation* JAIP. Vol 35. No 4, pp 216--224 dilihat pada <http://Lithgow-Schmidt/Sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation>. Pdf tanggal 30 Oktober 2009.
- Baiquni, M. 2007. *Strategi Penghidupan di Masa Krisis, Belajar dari Desa*. Yogyakarta: Ideas Media.
- Damanik, J. dan Weber, H. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dewi, M.H.U. 2004. *Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Tiga Desa Kawasan Wisata Lovina*. Denpasar: Lembaga Penelitian, Universitas Udayana.
- Fandeli, C. Raharjana, D.T. Kaharudin. 2003. *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Objek Wisata (Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi)* Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.

- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Lewis, J. 2003. Design Issues. In *Qualitative Research Practice: a Guide for Social Science Student Researcher* (eds.) Jane Ritchie and Janes Lewis. London: SAGE Publications
- Madiun. 2008. "Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan wisata Nusa Dua". *Disertasi: Program Pascasarjana*. Universitas Udayana.
- Nasikun. 1997. "Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan". dalam *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Nuryanti, W. 1999. *Heritage, Tourism and Local Communities*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pateman, C. 1990. *Participation and Democratic theory*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Pearce, D. 1995. *Tourism a Community Approach*. 2nd: Harlow Longman.
- Randolph, J. 2004. *Environmental Land Use Planning and Management*. Washington. D.C.: Island Press.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Brisbane : John Wiley & Sons, Inc.
- Timothy, D. J. 1999. Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia dalam *Annals of Research*, Vol 26, No.2.
- Wearing, S.L. and Donald, Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*.